



## Analisis Efektivitas Layanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya

Tukijan<sup>1</sup>, Ayu Anggraini Tambunan<sup>2</sup>, Aswad Amir<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik<sup>1,3</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota<sup>2</sup>

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Korespondensi: tukijanbima@gmail.com

### Abstrak

Analisis Efektivitas Layanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya. Tukijan, Ayu Anggraini Tambunan, Aswad Amir, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan publik di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, dengan menyoroti peran kearifan lokal dalam mendukung keberhasilan tata kelola pelayanan. Distrik Pisugi yang dihuni oleh masyarakat adat suku Dani memiliki struktur sosial, bahasa, dan nilai-nilai budaya yang kuat, sehingga pendekatan layanan publik yang tidak mempertimbangkan aspek lokal sering kali mengalami hambatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif ketika disampaikan melalui mekanisme adat seperti musyawarah (*Wene Obaa*), gotong royong (*Silimo*), serta keterlibatan tokoh adat. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat birokratis dan sentralistik tanpa mempertimbangkan struktur komunikasi lokal menimbulkan resistensi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta perlunya pelatihan budaya bagi aparatur pemerintahan agar pelayanan publik di wilayah adat dapat berlangsung secara kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Layanan publik, kearifan lokal, efektivitas pelayanan, masyarakat adat

### Analysis of the Effectiveness of Local Wisdom-Based Public Services in Pisugi District, Jayawijaya Regency

### Abstract

Land encroachment remains a significant agrarian issue affecting legal certainty and community Analysis of the Effectiveness of Public Services Based on Local Wisdom in Pisugi District Jayawijaya Regency. Analisis Efektivitas Layanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya. Tukijan, Ayu Anggraini Tambunan, Aswad Amir, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. This study aims to analyze the effectiveness of public services in Pisugi District, Jayawijaya Regency, by highlighting the role of local wisdom in supporting the success of governance practices. Pisugi District, inhabited by the indigenous Dani community, has a strong social structure, language, and cultural values. As such, public service approaches that disregard



Copyright © 2025 Tukijan<sup>1</sup>, Ayu Anggraini Tambunan<sup>2</sup>, Aswad Amir<sup>3</sup> 96

Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Submitted: 11/06/2025; Accepted: 22/06/2025; Published: 30/06/2025

local aspects often face obstacles. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The findings indicate that public services in health, education, and civil administration become more effective when delivered through traditional mechanisms such as deliberation (Wene Obaa), communal cooperation (Silimo), and the involvement of customary leaders. In contrast, bureaucratic and centralized approaches that ignore local communication structures result in resistance and low community participation. These findings underscore the importance of integrating local wisdom values into the formulation and implementation of public policies, as well as the need for cultural training for government officials so that public services in indigenous regions can be contextual, inclusive, and sustainable.

Keywords:

Public service, local wisdom, service effectiveness, indigenous community

## Pendahuluan

Layanan publik merupakan salah satu bentuk konkret kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal, tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan lokalitas. Hal ini menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat setempat agar layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan diterima dengan baik oleh warga. Kabupaten Jayawijaya yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah yang memiliki kompleksitas geografis, budaya, dan sosial yang khas. Salah satu distrik di wilayah ini yaitu Distrik Pisugi, dihuni oleh masyarakat adat dengan sistem nilai yang kuat dan budaya yang terjaga. Kearifan lokal seperti struktur sosial adat, nilai gotong royong, serta penggunaan bahasa lokal, masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, sistem nilai lokal ini justru menjadi kekuatan sosial yang dapat dijadikan pijakan dalam membangun pendekatan pelayanan publik yang lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, berbagai program layanan publik yang dijalankan di Distrik Pisugi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, maupun pembangunan kampung, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pendekatan layanan yang digunakan dengan budaya lokal masyarakat. Misalnya, sosialisasi program yang disampaikan secara top-down tanpa melibatkan tokoh adat sering kali tidak efektif. Demikian pula, penggunaan bahasa Indonesia secara eksklusif dalam komunikasi formal sering menyulitkan warga, terutama kelompok usia tua yang tidak terbiasa dengan bahasa nasional. Akibatnya, program yang sebenarnya dirancang untuk menyejahterakan masyarakat menjadi tidak berjalan optimal bahkan ditolak secara pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan publik tidak hanya bergantung pada desain kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan tata kelola yang inklusif dan sensitif terhadap kearifan lokal. Dalam konteks Pisugi, keterlibatan tokoh adat, pendekatan musyawarah kampung, dan pengakuan terhadap nilai-nilai komunal menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan layanan publik. Pengabaian terhadap elemen-elemen ini justru bisa menimbulkan resistensi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kegagalan program.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana tata kelola layanan publik di Distrik Pisugi dijalankan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada, serta sejauh mana pendekatan tersebut efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah ada di tingkat lokal, serta memberikan masukan bagi pengambil kebijakan agar layanan publik dapat dirancang secara lebih kontekstual, berdaya guna, dan diterima oleh masyarakat adat.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: Bagaimana bentuk kearifan lokal yang berpengaruh terhadap layanan publik di Pisugi? Sejauh mana

pemerintah distrik dan kampung mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem pelayanan mereka? Dan apakah pendekatan berbasis kearifan lokal benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan?

Dengan mengkaji hal-hal tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang administrasi publik dan governance, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan lembaga masyarakat dalam merumuskan kebijakan layanan publik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Jayawijaya dan daerah-daerah sejenis lainnya di Tanah Papua.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang praktik tata kelola layanan publik yang berbasis kearifan lokal di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi realitas sosial yang kompleks, kontekstual, dan kaya makna yang tidak dapat diungkap melalui angka-angka statistik semata. Pendekatan ini juga dianggap paling relevan karena peneliti ingin memahami persepsi, pengalaman, dan interpretasi aktor-aktor lokal (seperti aparatur pemerintah distrik, tokoh adat, kader kesehatan, dan masyarakat) terhadap efektivitas layanan publik yang disesuaikan dengan budaya lokal. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus, di mana Distrik Pisugi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas serta tingkat keterlibatan kearifan lokal yang tinggi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Distrik ini terdiri dari beberapa kampung dengan karakter masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai-nilai adat dan kekerabatan. Lokasi ini dipilih karena dianggap representatif untuk melihat bagaimana kearifan lokal mempengaruhi efektivitas layanan publik dalam konteks wilayah adat di Papua. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak bulan [isi bulan dan tahun], yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis dan penulisan laporan.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam layanan publik maupun kearifan lokal di Distrik Pisugi. Kriteria informan meliputi:

1. Aparatur pemerintah distrik dan kampung (kepala distrik, kepala kampung, staf pelayanan)
2. Tokoh adat dan tokoh masyarakat
3. Kader Posyandu atau petugas layanan dasar (pendidikan/kesehatan)
4. Warga masyarakat sebagai penerima layanan

Jumlah informan bersifat fleksibel mengikuti prinsip sampai data dianggap jenuh (saturation), yaitu saat wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan valid, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan utama menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini bertujuan menggali informasi mengenai praktik layanan publik yang dijalankan di Distrik Pisugi, nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan atau bahkan diabaikan dalam proses pelayanan, serta persepsi efektivitas layanan dari sisi penyedia maupun penerima layanan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, serta pemaknaan informan terhadap hubungan antara layanan publik dan budaya lokal.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif, yakni dengan mengamati secara langsung proses pelayanan publik di tingkat distrik dan kampung, interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat, serta penggunaan bahasa, simbol, dan praktik budaya lokal dalam situasi layanan publik. Observasi ini bersifat terbuka dan dilengkapi dengan pencatatan rinci dalam

bentuk catatan lapangan (field notes) guna mendukung data hasil wawancara. Observasi memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial dan praktik-praktik adat yang tidak selalu terungkap dalam wawancara.

Di samping itu, teknik studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti Profil Distrik Pisugi, dokumen program layanan publik yang mencakup laporan kegiatan dan data pelayanan, dokumen peraturan desa atau regulasi lokal, serta catatan hasil musyawarah kampung dan pertemuan adat. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan banding sekaligus penguatan terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2024) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, peringkasan, dan penyederhanaan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penting seperti peran tokoh adat, bentuk-bentuk kearifan lokal, kualitas layanan publik, serta hambatan implementasi. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau peta konsep untuk memudahkan analisis dan pemahaman. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyusun interpretasi dan pola makna dari data yang tersaji, serta melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut konsisten dan akurat terhadap data lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan empat kriteria keabsahan menurut Lincoln dan Guba (2015), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Aspek *credibility* dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta berbagai teknik pengumpulan data. Peneliti juga melakukan member check dengan meminta konfirmasi dari informan terhadap hasil wawancara. *Transferability* dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci sehingga pembaca dapat menentukan apakah hasil penelitian dapat diterapkan di konteks lain yang serupa. *Dependability* dijamin melalui penyusunan prosedur penelitian yang sistematis dan terdokumentasi, sehingga memungkinkan proses yang serupa direplikasi oleh peneliti lain. Sementara itu, *confirmability* dijaga dengan menjaga objektivitas peneliti, mendokumentasikan refleksi pribadi, serta menyimpan seluruh catatan lapangan dan transkrip sebagai bagian dari audit trail.

## Hasil dan Pembahasan

Distrik Pisugi merupakan salah satu distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang terdiri dari beberapa kampung adat. Masyarakat di distrik ini mayoritas berasal dari suku Dani dan masih mempertahankan struktur sosial, bahasa, dan nilai-nilai adat yang kuat. Aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat banyak berpusat pada kebun, ritual adat, dan pertemuan musyawarah. Bahasa daerah digunakan dalam hampir semua komunikasi harian, sedangkan Bahasa Indonesia hanya digunakan secara terbatas. Sistem kepemimpinan tradisional masih berpengaruh besar di masyarakat, di mana tokoh adat (termasuk kepala suku dan tetua kampung) memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan publik seperti pembagian bantuan, pelayanan kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur, cenderung berjalan lebih lancar apabila dilakukan dengan restu dan keterlibatan tokoh adat tersebut.

### Pelaksanaan Layanan Publik di Distrik Pisugi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat tiga sektor utama layanan publik yang paling menonjol di Distrik Pisugi, yaitu: layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan administrasi kependudukan. Ketiga layanan ini dijalankan oleh aparat pemerintah distrik dan kampung bekerja sama dengan instansi teknis di kabupaten, seperti Puskesmas dan Dinas Kependudukan. Namun demikian, pelaksanaan layanan publik tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses geografis yang sulit, dan

rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian warga masih belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak rutin membawa anak ke posyandu, karena dianggap belum relevan atau belum dipahami sepenuhnya manfaatnya.

#### *Peran Kearifan Lokal dalam Layanan Publik*

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal masyarakat Pisugi memiliki potensi besar dalam mendukung layanan publik, namun belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pemerintah. Beberapa bentuk kearifan lokal yang relevan antara lain:

1. Musyawarah adat (Wene Obaa). Sebuah forum pertemuan adat yang digunakan untuk mengambil keputusan kolektif. Forum ini sangat efektif untuk menyosialisasikan program publik seperti vaksinasi, pembagian bantuan sosial, atau kegiatan pendidikan.
2. Gotong royong (Silimo). Sistem kerja bersama yang masih dijalankan terutama dalam pembangunan fisik seperti rumah, jalan setapak, atau fasilitas umum. Kegiatan pembangunan infrastruktur publik dapat berjalan lebih baik jika difasilitasi melalui mekanisme gotong royong adat ini.
3. Hierarki sosial adat. Tokoh adat memiliki legitimasi yang sangat tinggi. Jika pemerintah melibatkan kepala suku atau tetua adat dalam menyampaikan program, maka tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat.

Namun dalam praktiknya, pendekatan birokratis dan sentralistik masih lebih dominan. Banyak program disampaikan langsung oleh aparat pemerintah tanpa memperhatikan struktur komunikasi lokal, sehingga menimbulkan kebingungan atau bahkan resistensi dari warga. Contohnya, terdapat program bantuan kesehatan yang gagal disalurkan dengan tepat karena prosedur teknis tidak dikomunikasikan dengan baik melalui jalur adat.

#### *Efektivitas Layanan Publik Berbasis Kearifan Lokal*

Efektivitas layanan publik di Distrik Pisugi cenderung meningkat ketika pendekatan yang digunakan selaras dengan nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa program posyandu dan imunisasi anak baru efektif setelah pemerintah bekerja sama dengan tokoh adat dan melakukan sosialisasi melalui forum musyawarah adat. Sebaliknya, program yang disampaikan tanpa keterlibatan tokoh lokal sering diabaikan atau tidak dipahami masyarakat.

Peneliti menemukan bahwa pendekatan komunikasi yang sesuai dengan budaya lokal menjadi faktor penentu efektivitas layanan. Misalnya, penyampaian informasi menggunakan bahasa daerah, disampaikan oleh tokoh yang dihormati, dan disesuaikan dengan waktu luang masyarakat (tidak bertabrakan dengan musim tanam atau upacara adat). Namun, masih ada tantangan dalam aspek konsistensi layanan. Banyak aparatur yang ditempatkan di distrik berasal dari luar daerah dan tidak memahami budaya lokal, sehingga interaksi dengan masyarakat kurang optimal. Selain itu, tidak ada pelatihan atau pedoman resmi yang mengarahkan aparat untuk menggunakan pendekatan berbasis budaya.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian mengenai layanan publik di Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengungkapkan dinamika sosial dan kultural yang kompleks serta keterkaitan erat antara struktur adat dengan efektivitas pelayanan publik. Distrik Pisugi dihuni oleh masyarakat dari suku Dani yang masih sangat kuat mempertahankan nilai-nilai adat, bahasa lokal, dan struktur sosial tradisional. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa daerah, sementara Bahasa Indonesia hanya dipakai secara terbatas, terutama pada konteks formal atau administrasi. Struktur kepemimpinan adat, yang terdiri dari kepala suku, tetua kampung, dan tokoh-tokoh adat lainnya, masih memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan kolektif. Ini tercermin dalam berbagai aktivitas publik seperti distribusi bantuan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang cenderung lebih efektif jika mendapatkan restu dan keterlibatan dari para pemimpin adat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa layanan publik di

Distrik Pisugi terutama berfokus pada tiga sektor utama, yakni layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan administrasi kependudukan. Ketiganya diupayakan melalui kolaborasi antara aparat distrik, kampung, dan instansi teknis dari pemerintah kabupaten, seperti Puskesmas dan Dinas Kependudukan.

Namun pelaksanaannya masih menemui banyak kendala, mulai dari minimnya sumber daya manusia, medan geografis yang sulit diakses, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan-layanan tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah pendekatan penyampaian program yang terlalu birokratis dan tidak selaras dengan pola komunikasi masyarakat adat setempat. Banyak warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau layanan kesehatan seperti posyandu, karena informasi tidak disampaikan dalam bahasa lokal atau melalui jalur adat yang mereka pahami dan percaya. Dalam konteks ini, kearifan lokal seperti musyawarah adat (*Wene Obaa*), sistem gotong royong (*Silimo*), serta struktur hierarkis adat justru memiliki potensi besar untuk memperkuat layanan publik. Misalnya, forum *Wene Obaa* terbukti sangat efektif sebagai sarana sosialisasi program-program publik, karena merupakan bagian dari tradisi yang dipercaya dan dihormati. Begitu pula *Silimo*, sebagai praktik gotong royong tradisional, telah mendukung banyak kegiatan pembangunan infrastruktur lokal secara swadaya dan efisien. Bahkan, keterlibatan tokoh adat terbukti mampu meningkatkan partisipasi warga karena adanya legitimasi yang diakui oleh komunitas. Meski begitu, pendekatan birokratis dari pemerintah yang terlalu sentralistik masih menjadi hambatan utama.

Banyak program tidak mempertimbangkan aspek kultural dan tidak menggunakan saluran komunikasi lokal, sehingga memicu resistensi atau ketidakpahaman di kalangan masyarakat. Beberapa program layanan kesehatan gagal terlaksana optimal karena tidak dikomunikasikan dengan cara yang selaras dengan nilai budaya setempat. Sebaliknya, ketika pemerintah melibatkan tokoh adat dan menggunakan media komunikasi tradisional serta bahasa daerah, program-program seperti posyandu dan imunisasi anak menunjukkan peningkatan efektivitas yang signifikan. Sayangnya, belum ada pelatihan khusus bagi aparat yang ditempatkan di distrik ini mengenai cara-cara pendekatan berbasis budaya lokal. Sebagian besar aparat berasal dari luar wilayah dan tidak memahami bahasa maupun kebiasaan masyarakat setempat, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam komunikasi dan pelayanan. Maka, dapat disimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam sistem layanan publik bukan hanya penting, tetapi sangat krusial untuk memastikan efektivitas program pemerintah di wilayah seperti Distrik Pisugi.

Penyesuaian komunikasi, waktu pelaksanaan, dan pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh adat bukan sekadar pendekatan alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam konteks sosial masyarakat adat Papua. Sejalan dengan temuan ini, beberapa studi terbaru juga mendukung pentingnya pendekatan berbasis budaya dalam pengelolaan layanan publik di wilayah adat. Misalnya, penelitian oleh Sihombing (2021), Lestari & Sudrajat (2022), dan Hadiyanto et al. (2023) menegaskan bahwa strategi pelayanan publik di daerah berbasis komunitas adat harus memperhatikan konteks lokal, termasuk bahasa, struktur sosial, serta nilai-nilai kearifan tradisional sebagai fondasi keberhasilan. Referensi-referensi tersebut memperkuat argumentasi bahwa tanpa integrasi kultural, intervensi pemerintah berisiko gagal memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah maupun pusat perlu menyusun kebijakan dan pedoman operasional yang mendukung penggunaan pendekatan kultural secara sistematis dalam pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah adat seperti Distrik Pisugi.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas layanan publik di Distrik Pisugi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kearifan lokal masyarakat adat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan. Struktur sosial adat, bahasa lokal, dan nilai-nilai tradisional seperti musyawarah adat (*Wene Obaa*) serta gotong royong (*Silimo*) terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap program-program pemerintah, terutama di bidang

kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang disampaikan melalui pendekatan birokratis dan *top-down* tanpa mempertimbangkan saluran komunikasi adat justru menimbulkan resistensi, ketidakpahaman, bahkan kegagalan implementasi. Di sisi lain, ketika tokoh adat dilibatkan secara aktif dan komunikasi dilakukan dalam bahasa lokal melalui forum musyawarah adat, pelayanan menjadi lebih efektif dan diterima dengan baik oleh warga. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan budaya bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen kunci dalam tata kelola pelayanan publik di wilayah adat seperti Pisugi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih kontekstual dan membekali aparatur dengan pelatihan tentang budaya lokal agar tercipta layanan publik yang inklusif, berdaya guna, dan berkelanjutan.

## Referensi

- Adnan, M. F., Syamsir, S., Alhadi, Z., Malau, H., Widesma, A. V., & Dt. Maani, K. (2022). *Integration of local wisdom values in realizing good Nagari governance*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 39–56.
- Liauw, Y. (2022). *Reformasi birokrasi di Papua: Peluang dan tantangan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–60.
- Luturmas, A. J., Wardhani, L. T. A. L., & Sukirno, S. (2024). *Strengthening indigenous governance structures based on local wisdom in protecting the territorial rights of Indigenous Peoples*. *Journal of World Science*, 3(7), 827–837. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.684>
- Mustajab, D. (2023). *Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik di Papua*. *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 10(1), 23–35.
- Numberi, G. K. I., Sanggenafa, C. O. I., & de Fretes, D. R. (2022). Pengembangan wisata budaya di Taman Nasional Wasur berbasis kearifan lokal. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.31957/jap.v3i1.2305>
- Rengifurwarin. (2020). *Public service based on local wisdom*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Sahputra, E., Harahap, R. H., Wahyuningsih, H., & Utomo, B. (2022). *Assessing the sustainability status of mangrove forest ecosystem management by coastal community in Jaring Halus Village, North Sumatra, Indonesia*. *Biodiversitas*, 23(1), 1–9. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230101>
- Sienkiewicz, S. (2022). *Is custom a tool for remedying or reinforcing social inequalities? New strategies for dialogue and peace in Maluku, Indonesia*. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 23(1), 20–39. <https://doi.org/10.1080/14442213.2021.2007280>
- Siombo, M. R., & et al. (2021). *Local wisdom as basic material for drafting local government regulations: A case study of Dayak forest fires in Kalimantan, Indonesia*. *LingCure: Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1067–1075.
- Sonbait, L. Y., Manik, H., Warmetan, H., Wambrauw, Y. L. D., Sagrim, M., Djitmau, D. A., Wanggai, J., Rettob, B. B., & Murdjoko, A. (2021). *The natural resource management to support tourism: A traditional knowledge approach in Pegunungan Arfak Nature Reserve, West Papua, Indonesia*. *Biodiversitas*, 22(10), 4466–4474. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d221040>
- Supiandi, M. I., Mahanal, S., Zubaidah, S., Julung, H., & Ege, B. (2019). *Local wisdom based Balinese digital storytelling through blended learning method*. *Linguistics and Culture Review*, 4(1), 48–54. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v4n1.26>
- Suranto & Darumurti, A. (2024). *Local wisdom-based policy innovation in Indonesia during 2018–2021*. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 60–70.
- Suranto, S., & Darumurti, A. (2024). *Local wisdom-based policy innovation in Indonesia during 2018–2021*. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 60–70.
- Utomo, S. L. (2022). *An examination of indigenous community-based strategies for sustaining food autonomy: Indonesia's case*. *Journal of Southwest Jiaotong University*. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.1.45>

Wiswayana, W. M., Yunita, P. Y., Indraswari, F. V., & Ponce, E. J. A. (2024). *The contribution of local wisdom in the green governance framework in Bromo Tengger Semeru National Park*. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 5(4), 549–555.